



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 224 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERKAIT DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus berperspektif gender dan peduli anak;
- b. bahwa untuk memastikan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperspektif gender dan peduli anak, perlu dilakukan analisis dan evaluasi secara berkala;
- c. bahwa untuk melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KETIGA : Tim Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 224 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas
3.	Ketua	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas
4.	Sekretaris	Robby Hesti P.N Ginting	Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
5.	Anggota	Yeyep Mulyana	1. Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
		Dwi Jalu Atmanto	2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		Chrystianto Budi Mulyono	3. Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		Dian Rahmawati	4. Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Roswinawaty Sitompul	5. Penyuluhan Sosial Ahli Madya pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Susanti	6. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Dian Ekawati	7. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Fivi Diawati	8. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Nanang Aminudin Rachman	9. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Permata Sari	10. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Andi Lele Ellung Pangerang	11. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Andi Nirmala Sari	12. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Dewi Mega Irhamna Justicia	13. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Tabita Mauliate Ulibasa	14. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Kara Klarissa Wolah	15. Penyusun Rancangan Peraturan Perundang undangan pada Deputi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
			Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Dita Andriasari	16. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Rina Mofu	17. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Rosandra Debi	18. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU